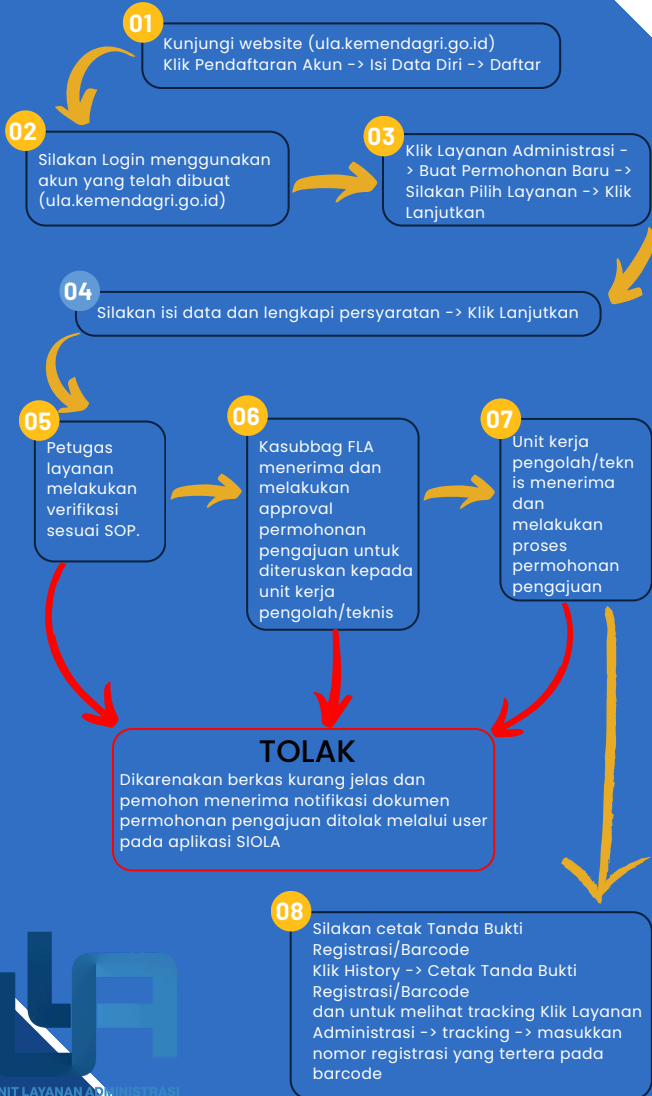


ALUR LAYANAN ADMINISTRASI



**UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



**UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PENGGANTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA



GEDUNG B LANTAI 1



**Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3521468 Fax. (021)
3524583**



JAM LAYANAN

**Senin - Kamis : 07.30 - 16:00
Jumat : 07.30 - 16.30**

MEDIA SOSIAL

ula.kemendagri.go.id
[ulakemendagri](#)
[ulakemendagri](#)
[ulakemendagri](#)
[ULA Kemendagri](#)
[ULA Kemendagri](#)



**DIREKTORAT JENDERAL
OTONOMI DAERAH**

Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pemberian rekomendasi Izin Penggantian Pejabat Bagi Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Serentak, Direktorat Otonomi Daerah khususnya di Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah mengupayakan suatu layanan administrasi berbasis online melalui E-mutasi yang terintegrasi dengan Sistem Basis data Kepegawaian Nasional BKN (SAPK).

Dasar Hukum

- 1.UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
- 2.UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
- 3.UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 4.PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
- 5.PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- 6.Perpres Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah ; dan
- 7.Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.
- 8.Permendagri No.137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Persyaratan

A.Provinsi

- 1.File Scan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta lampiran asli);
- 2.File Scan Rekomendasi KASN;
- 3.File Scan Persetujuan DPRD (untuk jabatan Sekwan Provinsi);
- 4.File Scan Surat Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara (khusus bagi PJ/PJS/PLT. Kepala Daerah);
- 5.File Scan Hasil Seleksi Terbuka/Uji Kompetensi yang dilengkapi nilai dan ditandatangani oleh Panitia Seleksi;
- 6.File Scan Curriculum Vitae/Daftar Riwayat Hidup;
- 7.File Scan Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom);
- 8.File Scan Data Dukung Penting Lainnya; dan
- 9.File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tanda tangani PPK/Gubernur.

B.Kabupaten/Kota

- 1.File Scan Surat Pengantar Gubernur kepada Mendagri (beserta lampiran, asli);
- 2.File Scan Surat Usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur (beserta lampiran asli);
- 3.File Scan Rekomendasi KASN;
- 4.File Scan Rekomendasi Gubernur (sekda kab/kota);
- 5.File Scan Persetujuan DPRD (untuk jabatan Sekwan Kab/kota);
- 6.File Scan Surat Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara (khusus bagi PJ/PJS/PLT. Kepala Daerah);
- 7.File Scan Hasil Seleksi Terbuka/Uji Kompetensi yang dilengkapi nilai dan ditandatangani oleh Panitia Seleksi;
- 8.File Scan Curriculum Vitae/Daftar Riwayat Hidup;
- 9.File Scan Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom);
- 10.File Scan Data Dukung Penting Lainnya; dan
- 11.File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tanda tangani PPK/Bupati/Walikota.



Waktu Penyelesaian Layanan

12 (dua belas) hari kerja



Output

Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Tertulis Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.